

VOLUME 11	NOMOR 1	MEI 2025
Artikel Masuk 14 Maret 2025	Revisi 17 Mei 2025	Diterima 20 Mei 2025
Publikasi 31 Mei 2025		

REPRESENTASI WACANA POLITIK PADA PEMBERITAAN KASUS SENGKETA PULAU REMPANG DI MEDIA MASSA ONLINE
REPRESENTATION OF POLITICAL DISCOURSE IN REPORTING DISPUTE CASES REMPANG ISLAND IN ONLINE MASS MEDIA

Rai Bagus Triadi¹, Frilia Shantika Regina², Reza Saeful Rachman^{3*}

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

² Universitas Pasundan, Indonesia

³ Universitas Sangga Buana, Indonesia

Surel: molikejora12@gmail.com

ABSTRAK

Representasi bentuk wacana politik banyak dilakukan oleh politikus dalam berbagai kesempatan. Hal tersebut dilakukan sebagai sebuah implementasi dari bentuk tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek keberpihakan masyarakat terhadap seorang tokoh atau sebuah pandangan politik. Salah satu kesempatan yang digunakan dalam merepresentasikan bentuk komunikasi politik adalah pada kasus sengketa Pulau Rempang. Pada kasus ini terlihat banyak respon yang diberikan oleh berbagai politikus yang berbentuk keberpihakan kepada masyarakat dan diberitakan pada media massa *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti berupaya menguraikan bentuk-bentuk tindakan komunikasi politik, baik itu yang dilakukan oleh perseorangan, maupun kelompok masyarakat yang merespon terkait kasus sengketa di pulau rempang. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Teori ini digunakan untuk melihat praktik komunikasi politik yang sedang berlangsung melalui dimensi teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* yang melatarbelakangi teks atau untuk melihat realitas aslinya yang menjadikan wacana itu muncul. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah pemberitaan di media massa *online* terkait kasus rempang priode bulan Juli-Oktober tahun 2023.

Kata kunci: representasi wacana politik, pemberitaan kasus sengketa, pulau rempang

ABSTRACT

Representation of forms of political discourse is often carried out by politicians on various occasions. This is done as an implementation of a form of planned communication action to create the effect of favoring the public towards a figure or a political view. One of the opportunities used to represent a form of political communication is the case of the Rempang Island dispute. In this case, it can be seen that many of the responses given by various politicians took the form of siding with the community and were reported in online mass media. In this regard, in this study the researcher attempts to describe the forms of political communication actions, both carried out by individuals and community groups who responded to dispute cases on Rempang Island. In this research, the theory used is Norman Fairclough's theory of critical discourse analysis. This theory is used to see ongoing political communication practices through the dimensions of text, discourse practice, and sociocultural practice that form the background of the text or to see the original reality that makes the discourse emerge. Meanwhile, the data source for this research is news in online mass media regarding the Rempang case for the period July-October 2023

Keywords: representation of political discourse, reporting on dispute cases, Rempang Island

© Copyright 2024 @Author (s) Jurnal Skripta by Department of Indonesian Language and Literature Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia



PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2023 terdapat kasus yang sempat menyita perhatian banyak masyarakat Indonesia yaitu konflik agraria pulau Rempang. Konflik ini terjadi antara warga masyarakat dengan investor yang melibatkan berbagai pihak. Konflik ini mulai terjadi mulai tahun 1980-an, pada saat itu terjadi kesepakatan antara Presiden Soeharto dengan BP Batam terkait hak pengelolaan. Namun pada tahun 2002 BP Batam mulai mengambil tanda tangan masyarakat terkait hak guna pakai dengan tujuan untuk pembangunan industri. Pada saat pengambilan izin atas hak guna pakai tersebut terjadi tumpang tindih antara tanah adat yang dipercayai oleh masyarakat adat (Rempang) dan tanah yang dimiliki oleh leluhur. Pada akhirnya, pada tahun 2023 terjadi penandatanganan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait investasi penanaman modal pada proyek strategis nasional. Pada proses pelaksanaannya proyek strategis nasional tersebut ditentang dan tidak disetujui oleh masyarakat karena dianggap melanggar perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Lebih jelasnya bahwa masyarakat bukan menolak pelaksanaan PSN-nya tetapi lebih menolak bentuk relokasi yang diterima masyarakat, Adapun bentuk justifikasinya terdiri dari beberapa alasan yaitu. 1). Mata pencarian warga setempat adalah nelayan, sehingga relokasi ke tengah perkotaan menjadi kendala untuk mengakses ke laut; 2). Terdapat kuburan dan tanah-tanah adat leluhur yang telah ada sejak lama; dan 3). Terdapat selisih paham dan perbedaan perspektif antara masyarakat asli Rempang dan masyarakat pendatang terkait dengan relokasi.

Pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kali konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pengembang kawasan Pulau Rempang *Eco City* yang akhirnya menggiring konflik tersebut menjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak aparaturnegara atau kepolisian. Selain konflik masyarakat, terdapat pula konflik politik yang terjadi antara para tokoh politik atau politikus yang merespon berbagai fenomena yang terdapat pada kasus ini. Peneliti mengambil contoh yaitu tokoh politik Amien Rais yang berasal dari Partai Ummat mendatangi para warga Rempang yang ditahan akibat aksi bentrok demonstrasi. Pada kunjungan tersebut Amien Rais bersedia menjaminkan dirinya untuk pembebasan pada tahanan tersebut. Aksi tokoh politik tersebut mendapatkan beberapa bentuk pemberitaan yang dilansir oleh berbagai media massa *online*. Adapun contoh bentuk pemberitaan tersebut sebagai berikut.

1. Media massa *online* TEMPO.CO "*Amien Rais Datang ke Pulau Rempang, Bicara Oligarki dan Demokrasi yang Pingsan*"
2. Media massa *online* TribunBatam.id "*Amien Rais Datangi Kampung Tua Pasir Panjang Rempang, makan Bareng dengan Warga*"
3. Media massa *online* KumparanNews.Com "*Amien Rais ke Polresta Barelang, Ajukan Jadi Jaminan Agar Warga Rempang Bebas*"
4. Media Massa *online* Politik.rmol.id "*Amien Rais dan Ketum Partai Ummat Jaminkan Diri untuk Pembebasan Warga Rempang*"

Berdasarkan contoh data tersebut dapat terlihat berbagai bentuk perbedaan pemberitaan yang dilakukan oleh berbagai media massa *online*. Perbedaan tersebut terlihat dari awal judul Ketika tokoh politik Amien Rais dianggap sebagai tokoh nasional dan judul terakhir yang mengaitkan Amin Rais dengan salah satu partai politik dimana dia bernaung sekarang. Perbedaan pemberitaan tersebut sejalan dengan pendapat Triadi (2018) bahwa Penggunaan dan pemilihan diksi secara kias pada judul pemberitaan sering dilakukan oleh media massa di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan nilai rasa atau emosi yang berbeda pada saat masyarakat membaca judul suatu pemberitaan. Judul berita dalam



ruang lingkup berita secara umum dapat diibaratkan sebagai sebuah topeng yang dipasang oleh penulis, dapat berupa topeng yang cantik dan menarik atau topeng yang buruk dan menyeramkan. Diperkuat oleh pendapat Ansori (2017) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah sebagai kontrol sosial, yaitu kemampuan bahasa dalam memengaruhi pikiran orang lain karena penggunaan bahasa. Pencitraan terjadi karena perluasan pengaruh yang dilakukan oleh penutur sebuah bahasa. Kalimat-kalimat yang ditulis media akan berpengaruh di masyarakat, bahkan mungkin dianggap sebuah kebenaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menyikapi perbedaan media massa pada sebuah kasus pemberitaan yang berkaitan dengan seseorang maupun dengan golongan sebagai sebuah fenomena yang seharusnya tidak ada. Hal ini dikarenakan dengan melihat konsep media massa sebagai kontrol sosial masyarakat yang seharusnya menghadirkan judul yang tidak memperlihatkan sebuah kontruksi wacana politik. Media harus memberikan informasi yang bersifat netral dan tingkat validitas kepercayaannya bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya mengikuti kontruksi yang dibangun oleh media massa. Karna tak dapat dipungkiri bahwa masing-masing media massa memiliki kontruksi yang berbeda-beda ketika melihat sebuah fenomena politik, budaya, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Selain itu terkadang fenomena yang terjadi dijadikan sebagai ajang pencitraan yang dilakukan oleh para politikus.

Menurut van Dijk (2004; dalam Mandarani, 2013:20) ada berbagai strategi yang digunakan dalam konteks politik untuk pencitraan baik tokoh maupun partai. Strategi tersebut antara lain (a) strategi actor description; (b) strategi pengajuan argumentasi fotoritas, (c) strategi pembebanan; (d) strategi kategorisasi; (e) strategi perbandingan; (f) strategi pengajuan konsesus; (g) strategi pengajuan sanggahan balik; (h) strategi pengajuan sanggahan (disclaimer); (i) strategi mengemukakan eufemisme; (j) strategi pembuktian; (k) strategi pengajuan contoh; (l) strategi generalisasi; (m) strategi hiperbola; (n) strategi implikasi (implikatur); (o) strategi ironi; (p) strategi leksikalisasi; (q) strategi metafora; (r) strategi persangkaan (presupposition); (s) strategi pengajuan contoh; (t) strategi pemuliaan diri; dan beberapa strategi lain yang sifatnya politis. Di antara strategi yang diajukan van Dijk tersebut beberapa di antaranya merupakan

Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa masing-masing surat kabar memiliki kontruksi pemberitaan yang berbeda-beda. Hal tersebut diakibatkan dari karakteristik jurnalis yang berada pada surat kabar tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mubarak (2012: 12) yang menyatakan bahwa Konstruksi Kompas dan Republika tentang sebuah fenomena dibedakan dari cara kedua menyusun fakta dan mengambil narasumber. Misal pada pemberitaan Negera Islam Indonesia, Kompas melengkapi pemberitaan dengan analisa dan penelitian, sementara Republika mengambil narasumber resmi dari berbagai kelompok dan Pejabat Negara.

Kemunculan tokoh politik dalam mengomentari kasus Rempang pun marak terjadi di media televisi. Beragam bentuk keberpihakan kepada masyarakat dilakukan, bahkan dari ketiga poros koalisi parpol yang mengajukan Capres di Pemilu 2024 pun ikut buka suara tentang permasalahan ini. Pada proses komentar selalu saja ada seorang subjek yang diunggulkan pada saat memaparkan bentuk-bentuk ketidaksetujuannya. Fenomena ini sejalan dengan konsep ideologi Althuseer dalam (Fiske, 1990) yang menjelaskan bahwa konsep tentang subjek dan ideologi. Beliau memandang ideologi selalu memerlukan subjek, sebaliknya subjek pasti memerlukan ideologi. Ideologi muncul berdasarkan hasil rumusan individu-individu tertentu, tetapi keberlakuannya menuntut tidak hanya kelompok yang bersangkutan. Penulis adalah sebuah individu, pengendalian pikiran-perasaan seseorang



hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dominan. Bahasa harus dipahami tidak sekadar alat interaksi, tetapi juga transaksi (Brown dan Yule, 1996).

Sejalan dengan uraian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis untuk menguraikan bentuk wacana politik yang hadir dalam pemberitaan kasus sengketa tanah di Pulau Rempang. Teori analisis wacana kritis secara umum dapat diuraikan sebagai sebuah media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan yang dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis dalam bentuk ini mengambil sebuah posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini terdapat beberapa perumusan masalah penelitian yaitu, 1) bentuk wacana politik yang terdapat pada pemberitaan konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang; 2) bentuk kontruksi wacana politik yang terdapat pada pemberitaan konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang berdasarkan pendekatan CDA Norman Fairclough.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan khusus pada penelitian ini adalah mencoba menguraikan bentuk wacana politik beserta kontruksinya yang terdapat pada pemberitaan konflik agraria yang terjadi dipulau rempang berdasarkan pendekatan CDA Norman Fairclough yang terdiri dari tiga aspek, yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sociocultral practice*. Selain itu urgensi penelitian ini adalah mencoba memberikan gambaran tentang sebuah praktik politik yang memanfaatkan berbagai fenomena, baik itu yang berupa fenomena sosial, agama, budaya, atau bahkan fenomena politik itu sendiri.

Praktik politik tersebut harus diketahui oleh masyarakat umum sebagai proses pembelajaran politik tentang praktik-praktik politik, dalam hal ini secara tidak langsung bentuk kampanye yang absah dilakukan oleh para tokoh politik dan partai politik yang ada di Indonesia. Sebagai pengingat juga kepada masyarakat tentang pola-pola kampanye yang memanfaatkan beberapa fenomena perundungan yang menimpa masyarakat di Indonesia.

Proses pemberitaan tidak dapat diingkari bahwa terdapat banyak kepentingan yang muncul di sana, baik itu dari pihak media massa itu sendiri, ataupun media massa memfasilitasi salah satu kepentingan seseorang tokoh, pihak, atau kelompok politik tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Heryanto (dalam Ansori, 2017) berpendapat bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan sejarah sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran dan tidak mampu memenuhi kebutuhan komunikasi personal tidaklah layak jadi kekuatan pembentuk pikiran perasaan dan suatu tata sosial yang sebelumnya tidak ada. Bagaimana proses sejarah sosial yang mendorong perubahan dari masyarakat berbahasa ke masyarakat berbahasa. Ketika proses keberpihakan dilakukan oleh seorang penulis berita atau sebuah lembaga jurnalistik, maka proses ini berlanjut keberpihakan pembaca sebagai salah satu kontrol sosial pula, tetapi dengan cara yang lain.

Konsep hegemoni Antonio Gramsci dalam (Setiawan, 2011) sangat berkaitan dengan konsep wacana politik yang terjadi pada pemberitaan kasus sengketa agrarian di Pulau Rempang. Teori Antonio Gramsci tentang kondep hegemoni yang mengonstruksikan suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi oleh kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media massa dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Hal ini bukan berarti media merupakan perwujudan kekuatan jahat yang secara sengaja merendahkan masyarakatkelas bawah. Kaitannya dengan tema pada penelitian ini adalah terkait dengan masyarakat pulau rempang dan pemerintah yang sedang mengalami konflik.



“First, world does not exist by itself but its existence comes through human experiences represented through language. Second, categorization that language makes occurs in terms of social interaction among prevailing social groups in particular time and space. Third, the comprehended reality in certain events is definitely determined by communication convention. Therefore, our knowledge is determined so much by stability of social life. Fourth, reality is socially constructed by communication patterns.

Uraian tersebut adalah pendapat dari Marianne dan Louise Phillips (2002) yang memberikan pandangan bahwa konstruksionisme sosial dibangun atas beberapa bentuk premis, yaitu 1) pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang *taken for granted*; 2) spesifikasi kultural dan historis; 3) hubungan antara pengetahuan dan proses sosial; 4) hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Premis pertama menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang dunia tidak bersifat benar secara absolut, namun lebih bersifat relative dan dinamis. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan tersebut diperoleh secara sosial atau produk wacana. Premis selanjutnya, yaitu premis kedua menekankan pada historisitas dan spesifitas eksistensi dan pengetahuan kita. Oleh karena bersifat kultural dan spesifik, maka pengetahuan dan cara kita memahami dunia bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi historis dan kulturalnya. Di sisi lain, wacana di sini dipahami sebagai tindakan sosial yang berperan dalam memproduksi dan mereproduksi dunia sosial (pengetahuan, identitas dan relasi sosial) dan pada gilirannya menciptakan atau mempertahankan polapola sosial tertentu.

Premis ketiga mengasumsikan bahwa cara pandang kita terhadap dunia dibentuk dan dipelihara oleh proses-proses sosial. Kategorisasi tentang mana pengetahuan yang benar dan yang salah diperoleh melalui interaksi sosial, tidak semata-mata merupakan hasil refleksi individual. Premis keempat memandang adanya hubungan antara pengetahuan dengan tindakan sosial. Akibatnya, konstruksi pengetahuan sosial yang berbeda akan menghasilkan tindakan sosial yang berbeda pula.

Uraian Teori konstruksionisme sosial di atas sangat berpengaruh secara signifikan dalam konstruksi teori analisis diskursus kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) yang digagas oleh Norman Fairclough.

Hal ini bisa diidentifikasi dari lima karakter umum yang ada dalam berbagai teori CDA yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Kelima karakter tersebut yakni: pertama, karakter dari proses-proses dan struktur-struktur kultural dan sosial sebagian bersifat linguistik. Karakter ini menegaskan bahwa dunia sosial yang di dalamnya terdapat berbagai proses dan struktur sosial, diproduksi melalui praktik-praktik linguistic diskursif. Melalui produksi dan konsumsi teks, praktik-praktik diskursif bisa merealisasikan reproduksi dan transformasi sosial dan kultural. Oleh karenanya, CDA berpretensi untuk menjelaskan dimensi linguistik diskursif dari berbagai fenomena sosial yang mencakup proses dan struktur sosial dan kulturalnya.

Karakter kedua adalah bahwa diskursus bersifat *constitutive* dan *constituted* yang berarti bahwa diskursus merupakan sebuah praktik sosial yang dapat menciptakan dunia sosial dan sekaligus eksistensinya diciptakan oleh praktik-praktik sosial yang lain. Berbeda dengan teori diskursus Laclau dan Mouffe yang hanya menekankan aspek konstitutif diskursus, CDA menganggap bahwa bahasa sebagai diskursus merupakan bentuk tindakan sosial yang menciptakan dan mengubah dunia dan juga bentuk tindakan sosial yang secara historis kultural muncul dalam hubungan yang dialektis dengan praktik-praktik sosial yang lain.



Karakter ketiga menekankan perlunya menganalisis penggunaan bahasa secara empiris dalam konteks sosialnya. CDA sangat berkepentingan untuk melakukan analisis tekstual linguistik terhadap penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Karakter ini juga membedakan CDA dengan teori diskursus lainnya.

Karakter keempat menegaskan fungsi ideologis dari diskursus. CDA beranggapan bahwa diskursus berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan relasi-relasi kekuatan sosial yang tidak setara di antara berbagai kelompok sosial yang ada.

CDA memandang bahwa kekuasaan menciptakan subjek dan agen. Konstitusi subjek melalui produksi pengetahuan mengandaikan dependensi subjek terhadap elemen-elemen eksternal yang bersifat sosial dan kultural dalam proses kemenjadiannya. Selain itu, CDA juga dipengaruhi tradisi Marxis dengan meminjam konsep ideologinya untuk mengartikulasikan subjugasi atau penindasan satu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain. Dengan demikian, penelitian CDA terfokus pada dua hal, yakni: praktik-praktik diskursif yang menciptakan representasi tentang dunia subjek-subjek serta relasi-relasi sosialnya, dan peran dari praktik-praktik diskursif ini untuk memaparkan dan melestarikan kepentingan politik kelompok-kelompok sosial tertentu.

Berkaitan dengan uraian tersebut pada penelitian ini teori yang digunakan sebagai pendekatan analisis adalah teori Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough. Teori *Critical Discourse Analysis* (CDA), Fairclough (dalam Eriyanto, 2003: 288) memaparkan ada tiga dimensi analisis wacana, yaitu dimensi *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. (a) Dimensi teks (mikrostruktural) dianalisis secara linguistik, yakni dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, dan sintaksis. (b) *Discourse practice* (mesostruktural) yaitu dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. (c) *Sociocultural practice* (makrostruktural) adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks.

Selanjutnya, Ketiga dimensi analisis wacana tersebut dianalisis menggunakan tiga tahapan analisis yang berbeda, hal yang pertama dilakukan adalah deskripsi data untuk menganalisis teks, meliputi kohesi dan koherensi, tata Bahasa, dan pemilihan diksi. Pada tahapan ini pemilihan teks lebih khusus pada judul dan data isi pemberitaan dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat bentuk konstruksi politik yang terapat pada wacana tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses penyajian data dan analisis data berbentuk deskripsi. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini berkedudukan bahwa temuan data penelitian berupa teks disajikan apa adanya tanpa sebuah intervensi. Selanjutnya, yang menjadi data penelitian ini adalah berbagai tulisan meliputi judul beserta keterkaitan isi pada media massa online yang memuat pemberitaan kasus sengketa antara Rempang *eco city* dengan masyarakat rempang.

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, dimulai dari bulan Juni hingga Oktober 2023. Pada proses pengumpulan data peneliti mengambil judul pemberitaan dan isi berita dari berbagai media massa online Indonesia yang berbentuk laman. Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama yaitu peneliti mencari data kedekatan judul berita dengan bentuk wacana politik yang terkait dari kasus rempang. Tahap selanjutnya adalah mengaitkan antara judul berita dengan teks isi berita yang dipilih berdasarkan pemilihan diksi, penggunaan kalimat dan pemilihan tokoh politik dalam sebuah upaya berita dijadikan sebagai alat penggiring ideologi kepada masyarakat umum. Terdapat keterkaitan antara pemaparan metode



penelitian dan skema cara kerja penelitian dengan kontruksi tataran linguistik yang nantinya akan dianalisis, dipakai untuk melihat beberapa masalah mengenai ideasional yang merujuk kepada sebuah representasi tertentu yang ingin ditampilkan penulis pada judul dan isi yang secara tidak langsung membawa muatan pengiringan publik terhadap dukungan politik pada salah satu tokoh atau golongan politik tertentu.

Bentuk representasi tersebut menurut Fairclough dianalisis dalam tiga hal tentang bagaimana penulis yang mewakili perseorangan, kelompok dan juga sebuah gagasan yang coba ditunjukkan dalam bentuk sarkasme, dalam kombinasi judul serta dalam rangkaian antarkalimat dalam isi berita. Bentuk representasi dalam anak kalimat, pemakaian bahasa oleh penulis pada judul dan isi berita dihadapkan pada tiga pilihan. Pertama, pada tingkat pilihan diksi. Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat tata bahasa. Ketiga konteks ditampilkan sebagai sebuah tindakan, peristiwa, keadaan yang berusaha melakukan penggiringan publik, atau hanya sebagai proses mental yang dilakukan untuk menarik *netizen* membaca laman yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat urutan pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini sebagai berikut. 1) Penentuan laman berita yang menjadi sumber data (laman meliputi laman regional, lokal dan internasional); 2) Penentuan instrument penelitian berdasarkan tahapan analisis CDA; 3) Pengumpulan data 4) Analisis data berdasarkan teori yang telah ditentukan 5) Validitas data berdasarkan instrumen yang telah disiapkan 6) Penarikan simpulan.

Pada point yang keempat analisis data dilakukan beberapa tahap, dimulai dari kajian teks yang terkait dengan judul maupun isi dari pemberitaan kasus perebutan lahan di Pulau Rempang. Tahap kedua yaitu melihat praksis kewacanaan, yaitu produksi teks dan interpretasi, dan tahap ketiga yaitu praksis sosiokultural, yaitu perubahan-perubahan masyarakat institusi budaya yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data peneliti menemukan sebanyak 8 data penelitian yang membahas tentang kasus sengketa lahan di pulau Rempang. Adapun uraiannya peneliti paparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Data Penelitian

No	No Data	Judul Pemberitaan	Media massa
1	D01	<i>Pulau Rempang Disulap Jadi Eco City, Warganya Dapat Apa?</i>	https://www.cnbcindonesia.com/news/
2	D02	<i>Prabowo:Peristiwa dirempang ada campur tangan intel asing</i>	https://app.cnnindonesia.com
3	D03	<i>Ganjar Bicara Solusi Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan</i>	https://app.cnnindonesia.com



4	D04	<i>Proyek Rempang Eco City Jalan Terus, Tidak Ada Pembatalan!</i>	https://www.cnbcindonesia.com/news/
5	D05	<i>Pulau Rempang dan ragam respon dari Poros Koalisi Parpol</i>	https://www.detik.com/properti/berita/
6	D06	<i>Politikus demokrat minta pemerintah hentikan sementara Proyek Investasi di Pulau Rempang</i>	https://www.kompas.id/baca/riset/
7	D07	<i>Politikus Nasdem Desak Aparat Stop Kekerasan di Rempang</i>	https://nasional.tempo.co
8	D08	<i>Politikus Gerindra Minta Menteri Bahlil Segera Selesaikan Masalah di Pulau Rempang.</i>	https://www.kompas.tv/nasional/

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bentuk-bentuk dekonstruksi yang ditampilkan oleh beberapa media massa. Proses pemberitaan tidak lagi hanya memberikan informasi kepada masyarakat tetapi terdapat berbagai muatan yang ada di dalamnya. Pada penelitian ini salah satu bentuk muatan yang akan dianalisis adalah representasi politik yang muncul pada judul pemberitaan tersebut. Pada proses analisis peneliti tidak akan menganalisis keseluruhan judul tersebut. Peneliti akan mengambil sebagian yang merupakan perbandingan dari judul-judul pemberitaan yang ada.

Pada data D01 dengan judul "*Pulau Rempang Disulap Jadi Eco City, Warganya Dapat Apa?*" Judul ini terdiri dari satu kalimat yang disusun berdasarkan dua klausa. Klausa pertama yaitu berbentuk pernyataan "*Pulau Rempang Disulap Jadi Eco City*, dan klausa kedua diisi oleh bentuk pertanyaan "*warganya dapat apa?*" kedua klausa ini menyatakan hubungan keterkaitan antar klausa yang menyatakan perlawanan. Berdasarkan segi semantis klausa pertama dimaknai secara positif, dicirikan dengan penggunaan kata *eco city* yang dapat dimaknai sebagai "kota ramah", sedangkan klausa kedua secara semantis bermakna negatif dengan mempertanyakan "warga dapat apa?"

Selanjutnya, berdasarkan *Discourse practice* terdapat sebuah diksi yang menjadi perhatian untuk dianalisis, yaitu penggunaan diksi *disulap* yang sengaja dipilih oleh penulis berita. Kata *disulap* secara leksikal tidak terdapat pada KBBI. Pada KBBI hanya terdapat pemaknaan kata dasar dan bentuk-bentuk turunan lainnya. Kata dasar *sulap* pada KBBI memiliki pemaknaan pertunjukan berbuat sesuatu yang menakjubkan, sedangkan apabila diuraikan secara kontekstual *disulap* pada konteks klausa tersebut memiliki pemaknaan "mengubah sesuatu dengan cara Ajaib". Berdasarkan uraian tersebut representasi wacana politik yang muncul pada judul pemberitaan tersebut memiliki bentuk-bentuk hipokripsi yang berbentuk menyembunyikan kenyataan sesungguhnya dengan menyamarkan situasi. Proses penyamaran tersebut terlihat pada kata *Eco city* yang dimaknai sebagai sebuah kota yang terlihat sangat mandiri dan fungsi ekosistemnya berjalan secara alami.

Pada data selanjutnya yaitu data D02 dengan judul pemberitaan "*Prabowo: Peristiwa di Rempang Ada Campur tangan intel asing*". Pada judul tersebut terlihat penulis berita menggunakan kalimat tidak langsung yang bersumber dari tuturan seorang tokoh politik, dalam hal ini adalah Bapak Prabowo. Berdasarkan aspek *sociocultural practice* dapat terlihat



judul pemberitaan ini sangat memperlihatkan adanya bentuk keterkaitan antara penutur dan isi tuturannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa tokoh politik Prabowo merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat jenderal pada kesatuan komando khusus, sudah tentu hal ini berkaitan dengan strategi keamanan nasional yang salah satunya mengawasi pihak-pihak asing yang ada di Indonesia. Pada kesempatan tersebut wacana politik yang dibangun adalah melibatkan pihak asing sebagai dalang dari kerusuhan yang ada di Rempang.

Aspek *sociocultural practice* tersebut diperkuat dengan *Discourse practice* yang dilakukan oleh penulis berita dengan pemilihan diksi "*campur tangan*". Diksi campur tangan memiliki makna yang negatif di masyarakat. Selama ini diksi tersebut selalu dikaitkan terhadap sebuah kondisi yang memperlihatkan keikutsertaan pihak yang seharusnya tidak ikut serta atau dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi yang seharusnya tidak terjadi, Pemilihan diksi ini memperlihatkan ideologi penulis yang ingin menunjukkan bahwa sebuah permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh sebuah badan yang memang semestinya malah terdapat pihak asing yang masuk ke dalam permasalahan tersebut. Pihak asing pada wacana tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait tujuan yang ingin dicapai dengan adanya campur tangan tersebut. Asumsi yang dibangun pada judul tersebut benar-benar memperlihatkan sebuah kondisi yang berada di luar teks. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat hal ini sudah pada tahapan level situasional. Tuturan yang dijadikan judul pemberitaan tersebut terlihat sebagai sebuah tindakan yang nantinya akan muncul sebuah respon pada sebuah situasi dan konteks yang beredar di masyarakat. Hal ini berpotensi akan muncul, karena beberapa kali kejadian atau fenomena politik yang ada di Indonesia sering kali dikaitkan dengan pihak luar yang menjadi pemicunya. Kita bisa melirik kebelakang terkait fenomena reformasi 1998, bom bali dan Jakarta, dan berbagai kerusuhan yang berbau SARA terjadi di Indonesia.

Pada data 03 yaitu judul pemberitaan "*Ganjar Bicara Solusi Rempang: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan*" memiliki kemiripan dengan data 02 yaitu seorang tokoh nasional yang sedang dalam kondisi kontestasi politik pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Pada judul ini Ganjar menuturkan "*pemimpin tertinggi harus turun tangan*". Tuturan tersebut memberikan kesan bahwa selama kasus ini bergulir pemimpin tertinggi atau bisa disebut presiden tidak mengambil tindakan. Terkait dengan aspek pertama yaitu *tekt*, Pola menyudutkan pihak pemerintahan terjadi pada judul pemberitaan ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan polemik yang terjadi antara presiden dengan partai politik yang mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Polimik ini terus mengalami perkembangan yang semakin luas. Terlihat pada perpindahan arah politik dari kedua komponen yang berseteru.

Pada aspek yang kedua yaitu *discourse practice*, wacana yang terdapat pada judul tersebut memperlihatkan bahwa memang sudah benar adanya terdapat perbedaan pandangan politik antara ganjar yang menyuarakan suara partai politik PDI dengan Presiden republik Indonesia. Posisi PDI yang sebelumnya menjadi partai koalisi pemerintahan seolah-olah berubah menjadi partai oposisi. Perubahan ini ditandai dengan bentuk-bentuk kritik yang diberikan pada setiap keputusan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan keputusan partai. Pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah ini sehingga dibuatlah opini atau konsumsi teks bahwa pemimpin tertinggi atau di sini disebut presiden harus turun tangan. Pada pemberitaan *online* teks akan dibuat berkelompok dengan teks yang sejenis. Pola-pola ketidaksetujuan keputusan presiden banyak dibuat sehingga akhirnya opini masyarakat akan terbentuk dan akhirnya tertuju pada sebuah keyakinan. Hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak munculnya aspek yang ketiga yaitu *sociocultural practice*. Pemilihan diksi *harus turun tangan*



memperlihatkan dua situasi, pertama bahwa pemimpin negara dianggap bersikap tidak acuh terhadap permasalahan sengketa yang ada di pulau rempang dan kedua institusi negara yaitu pihak pemerintahan daerah dan pusat dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kedua situasi ini langsung akan muncul pada konsumsi masyarakat akan judul pemberitaan ini terkait kepentingan politik, faktor-faktor budaya masyarakat pendatang, rencana peningkatan ekonomi pemerintahan, sistem pengelolaan asset negara dan lain sebagainya.

Pada data 05 yaitu pada judul berita *Pulau Rempang dan ragam respon dari Poros Koalisi Parpol* memperlihatkan sebuah konsistensi kondisi politik yang ada di Indonesia menjelang kontestasi politik tahun 2024. Pada judul tersebut terlihat sebuah kondisi yang memperlihatkan sebuah poros koalisi Parpol telah terbentuk. Peneliti melihat banyak perpindahan dan perubahan arah dari masing-masing partai politik dilihat dari berbagai aspek. Salah satu aspek terbesarnya adalah terkait bentuk dukungan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden Indonesia di 2024. Pada kenyataannya perpindahan koalisi ini bentuk dari buntut ketidakharmonisan antara Presiden dengan partai politik PDIP. Aspek pertama yaitu terkait produksi text, penulis judul berita ini berupaya menampilkan sebuah kondisi terkait adanya kubu yang telah terbentuk menjadi sebuah poros-poros kualisi, hal ini dapat terlihat pada kutipan *Poros Koalisi Parpol*. Jika melihat kondisi menjelang kontestasi politik berarti dapat dikatakan poros koalisi terdiri dari tiga kubu, yaitu kubu Prabowo, Anis dan kubu Ganjar. Kondisi ini juga nantinya akan dihubungkan dengan bentuk-bentuk respon yang disampaikan oleh masing-masing poros koalisi. Akan sangat tampak proses dukungan dan bantahan dilakukan untuk menyikapi langkah-langkah yang diambil selama ini oleh pemerintah.

Aspek *discourse practice* pada judul pemberitaan memperlihatkan bahwa berita ini disusun dengan melihat perkembangan fenomena politik yang ada di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Disebut perkembangan karena belum adanya kepastian koalisi yang terbentuk. Masih terdapat beberapa Parpol yang belum menentukan arah dukungannya. Selain itu teks yang diterima masyarakat juga akan menghasilkan sebuah pernyataan tentang kubu-kubu yang telah terbentuk dan kubu mana yang mendukung pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan terkait respon politikus terkait permasalahan yang ada di pulau rempang. Ideologi terkait pemisahan kubu ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap *sociocultral practice* yang selama ini dipahami oleh masyarakat terkait partai politik yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah memahami atau menjadi sebuah budaya bahwa setelah era orde baru arah partai politik yang ada di Indonesia selalu terbagi menjadi dua yaitu kubu koalisi dan kubu oposisi. Peneliti mengamati bahwa semenjak Presiden Jokowi menjabat partai PDIP selalu berada di kubu koalisi dikarenakan Presiden Jokowi merupakan seorang kader partai PDIP. Pada akhir kepemimpinannya justru PDIP menunjukkan arah yang berlawanan. Hal ini ditandai terkait konflik yang terjadi antar keduanya. Banyak keputusan Presiden yang dikritisi oleh berbagai unsur yang berasal dari partai tersebut, misal kepala daerah, anggota dewan, hingga individu politikus. Bentuk-bentuk kritik itu terlampir pada isi berita yang menggiring masyarakat terhadap opini bahwa pemerintahan tidak dapat menyelesaikan kasus Rempang dengan baik.

Data selanjutnya yang akan dianalisis adalah data d06 dengan judul pemberitaan *Politikus demokrat minta pemerintah hentikan sementara Proyek Investasi di Pulau Rempang*. Pada pemberitaan ini politikus yang berasal dari partai demokrat adalah Herman Khaeron yang merupakan anggota DPR RI. Pada pemberitaan ini wacana politik muncul karena terdapat nama sebuah partai politik yaitu partai demokrat muncul pada judul. Aspek text yang muncul pada pemberitaan tersebut menampilkan sebuah keadaan terkait salah



satu politikus yang meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara proyek investasi di pulau rempang. Terdapat beberapa diksi yang menarik dan akhirnya memunculkan ideologi politik di sini, salah satunya adalah diksi *investasi*. Pada diksi ini penulis berita melakukan sebuah penggiringan opini melalui tuturan seseorang bahwa yang selama ini dilakukan di Pulau Rempang adalah prihal investasi semata. Pada KBBI investasi dimaknai sebagai sebuah kegiatan penanaman uang atau modal pada proyek yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Uraian terkait unsur pertama yaitu pada aspek text sangat mempengaruhi unsur berikutnya yaitu Aspek *discourse practice*. Pada aspek ini terlihat masyarakat dihadapkan pada dua kondisi ketika harus menjadi *receiver*. Kondisi pertama yaitu terkait fakta-fakta yang disampaikan terkait sengketa yang dihadapkan kepada pemerintah oleh politikus DPR RI. Pada fakta tersebut disampaikan bahwa pemerintah tidak melaksanakan pembangunan yang pro kepada rakyat dan ketika dilaksanakan tidak tampak juga sikap-sikap humanis yang dijalankan oleh pemerintah. Pengindahan sikap humanis tersebut disampaikan dengan fakta bahwa pemerintah menerima lebih dari 100 triliun untuk menyelesaikan permasalahan dengan warga. Kondisi pertama tersebut akan menghadirkan beberapa silogisme yang akhirnya memunculkan kondisi yang kedua, bahwa pemerintah hanya menganggap permasalahan di pulau rempang sebagai bentuk investasi semata. Pada aspek *sociocultral practice* yang muncul pada judul pemberitaan dan isi berita tersebut terlihat proses pembentukan karakter si pembicara pada berita. Hal ini terlihat ketika kata ganti ia digunakan pada konteks kalimat *setelah berdialog, ia berjanji menjaga hak masyarakat untuk tidak direlokasi, melainkan menggeser tempat tinggal mereka*. Bentuk-bentuk pernyataan beliau ketika berusaha menyudutkan pemerintah dan memberikan pernyataan ikut bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat merupakan sebuah langkah politik untuk membentuk citra positif di mata masyarakat.

SIMPULAN

Ideologi politik yang dibangun pada kontruksi wacana pemberitaan kasus rempang terdiri dari beberapa hal. Pertama terkait kekuatan institusi yang digunakan dalam proses penyampaian judul berita. Institusi yang digunakan dalam pemberitaan ini memuat beberapa institusi, antara lain pemerintah, DPR, partai politik, aparat negara dan yang mewakili pihak individu. Konteks kekuatan ini dipakai sebagai dasar kemampuan seseorang untuk menyatakan pendapatnya terkait sengketa yang sedang terjadi di Pulau Rempang. Ketika seseorang berhak atau dianggap berkompetensi atas permasalahan tersebut akan muncul pola pembangunan citra yang diberikan kepada dirinya atau kepada lawan politiknya. Hal ini tampak ketika beberapa institusi mulai membangun citra negatif dengan cara menyalahkan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan bentuk citra positif dibangun dengan optimisme bahwa dirinya atau institusinya mempunyai alternatif lain yang bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Penggunaan diksi pada judul pemberitaan merupakan sebuah cara yang penulis lakukan untuk membangun sebuah kontruksi yang tampak nyata dengan menghadirkan beberapa fakta yang nantinya digunakan untuk menggiring sebuah opini. Penggunaan diksi pada judul berita sangat terlihat memiliki banyak referen. Hal ini dilakukan karena penulis berita terlihat sangat ingin menghadirkan bentuk-bentuk kontekstual pada sebuah situasi, sistem politik dan budaya, serta bentuk institusional.



REFERENSI

- Ansori, Dadang. 2017. Analisis Wacana Teori, Aplikasi dan Pembelajaran. Bandung: UPI Press.
- Brown, G. dan Yule, G. 1996. Analisis Wacana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cenderamata, R. C. & Darmayanti, N. 2019. Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. Jurnal Literasi. Volume 3, Nomor 1. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/literasi/article/view/1736>, pada tanggal 23 oktober 2021.
- Eriyanto. 2003. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. New York: Addison Wesley Longman.
- Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold. Fairclough, Norman. 2003. Critical Discourse Analysis in Transdisciplinary Research. London: Edward Arnold. Fiske, John. 1990. Introduction to Communication Studies (Second Edition). London and New York: Routledge.
- Jorgensen, Marianne dan Louise Phillips. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. Los Angeles: Sage.
- Kress, G. 1984. Linguistik and Ideological Transformations in News Reporting: Language, Image, Media (Davis, H. Walton, P., eds). England: Basic Blackwell.
- Mandarani, Vidya. 2013. "Pencitraan Joko Widodo dan Fauzi Bowo dalam Media Harian Kompas pada Pilkada DKI Jakarta 2012". Thesis : Magister Program Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya
- Mubarok dan Adnjani, Made Dwi. 2021. KONSTRUKSI PEMBERITAAN MEDIA TENTANG NEGARA ISLAM INDONESIA (ANALISIS FRAMING REPUBLIKA DAN KOMPAS. Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 3 No. 1, Februari – Juli 2012. Diakses pada 2 Desember 2021.
- Setiawan, Budiyanoto. 2011. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender: Jurnal Ilmiah Komunikasi Vol 2, No 1.
- Sorensen, Anne Scott dan Charlotte Krolokke. 2006. Gender Communication Theories and Analyses. Thousand Oaks. California: Sage Publications, Inc.
- Tjumano, Konglomerasi Media Massa, Kompas, 8 September 2013.
- Triadi, Rai Bagus, Firman Aziz. Kontruksi Media Pada Politikus Wanita: Judul Pemberitaan Kasus Hoaks Tokoh Politik Perempuan Pada Media Massa Online Indonesia. Jurnal Dieksis, Vol 11, no 2. 2019 di akses dari <http://.ac.id/index.php/Deiksis/ricle/view/3636>. diakses pada 27 oktober 2021.
- Wibowo, W. 2009. Menuju Jurnalisme beretika, Peran bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial. Jakarta: Kompas 25-30 Jurnal dengan 5 jurnal dari Gema Online.

